BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Audit kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi dikategorikan baik. Hal ini didukung dengan melakukan penilaian secara independen, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Namun jika dilihat dari segi ekonomi dan efisiensi serta kepatuhan terhadap kebijakan, dan peraturan hukum yang berlaku, dalam hal kinerja pemerintah khususnya bendahara dikategorikan cukup.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi dikategorikan baik. Hal ini didukung dengan pengawasan keuangan yang dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan untuk menjamin terlaksananya tugas umum dan pembangunan pemerintahan, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pemerintah baik secara intern

maupun ekstern sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan fungsional di Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan fungsional ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Namun dalam segi pengawasan fungsional yang dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran masih dikategorikan cukup karena masih lemahnya pengawasan.

3. Akuntabilitas publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi sudah terpenuhi dengan baik. Hal ini didukung dengan terpenuhinya akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and llegality*), akuntabilitas proses (*proccess accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Namun dari segi akuntabilitas program (*program accountability*) masih dikategorikan cukup karena tidak adanya laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana sering terjadi, serta dalam pelaksanaan program yang ditetapkan di SKPD mayoritas menyatakan program tercapai 75% - 80% sama dengan yang ditetapkan seharusnya program yang baik itu tercapai 100% (mencapai hasil yang optimal).
4. Secara parsial pengawasan fungsional memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap akuntabilitas publik sebesar 47,61% dibanding audit kinerja yang memberikan pengaruh sebesar 32,72%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap akuntabilitas publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Sedangkan audit kinerja dan pengawasan fungsional secara simultan memberikan pengaruh sebesar 59,40% terhadap akuntabilitas publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi, dan sisanya sebesar 40,60% dipengaruhi faktor lain seperti pelayanan publik, kualitas informasi keuangan, dan manajerial.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa dimana audit kinerja dan pengawasan fungsional telah terbukti berperan dalam menunjang akuntabilitas publik, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukkan yang kepada Pemerintah Kota Cimahi sebagai berikut :

1. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi sebaiknya tidak hanya terbatas pada rekomendasi yang diberikan oleh auditor atas hasil audit kinerja tapi pelaksanaan dari tindak lanjut audit tersebut yang sangat penting terlebih lagi dari segi ekonomi dan efisiensi serta kepatuhan terhadap kebijakan, dan peraturan hukum yang berlaku, dalam hal kinerja pemerintah khususnya bendahara yang masih dikategorikan cukup, dimana diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kegiatan selanjutnya, sehingga kinerja pada periode berikutnya bisa lebih baik.
2. Kepada pihak yang terkait dengan pengawasan fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi agar lebih

meningkatkan kinerja dalam segi pengawasan fungsional yang dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran sehingga pelaksanaan pengawasan fungsional yang telah terlaksana dapat lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

3. Untuk akuntabilitas publik agar dapat terlaksana dengan baik, maka harus lebih terbuka dalam hal laporan pertanggungjawaban program-program yang terlaksana kepada masyarakat yaitu melalui perwakilan publik. Selain itu masukan dan keluhan yang berasal dari masyarakat dapat menjadi *feedback* dalam perbaikan kinerja pada periode berikutnya.
4. Kepada pihak yang terkait sebaiknya pelaksanaan audit kinerja sektor publik dilaksanakan bersamaan atau diimbangi pula dengan pelaksanaan pengawasan fungsional yang lebih baik agar peningkatan pada akuntabilitas publik dimasa yang akan datang bisa lebih baik lagi. Disamping itu selain audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional agar pelayanan publik, kualitas informasi keuangan, dan manajerial pun bisa dilaksanakn sebaik mungkin sehingga akuntabilitas publik bisa terlaksana lebih baik.